

Analisis terhadap hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah (studi hubungan kerja pada tenaga kerja cleaning service di direktorat jenderal anggaran)

Heru Andrianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369571&lokasi=lokal>

Abstrak

[ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.

Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

<hr>

ABSTRACT

This thesis examines impact of partial assignment of the work implementation to

other company (outsourcing) particularly in government institutions. The purpose of this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system in government institutions particularly at Directorate General of Budget.

The research methodology used is normative law and is based on the principles of law and the legal system.

Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated in Employment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementation from Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor and Transmigration of Republic of Indonesia Number 100/Men/VI/2004 was issued concerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004 concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permit and Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment of Work Implementation to other Company. As it is implemented in government institutions, then partial assignment of work implementation to other company is conducted through procurement of government's goods and service. Legal provisions in public domain becomes an umbrella for government in entering a goods/service procurement contract particularly Law No. 17 Year 2003 concerning State's Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004 concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contract company selection in government institutions currently is conducted with mechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003 concerning Guideline on Government's Goods and Service Procurement Implementation. The work relation is entered between PT Daya Sgracipta Bersih with its work is work relations. The Relationship between PT Daya Sgracipta Bersih is a employment relations with their employees.

To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisions concerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi years contract application at contract of Partial Assignment of Work Implementation to other Companies.;Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya pada Direktorat jenderal Anggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat

Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.

Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja.

Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain]